

**PENGARUH IMPLEMENTASI *E-PLANNING*, *E-BUDGETING*,
DAN *E-PROCUREMENT* TERHADAP TRANSPARANSI
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**



Skripsi Oleh:

OKTAVIA AYU PADMASARI

(01031182025020)

AKUNTANSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF
PENGARUH IMPLEMENTASI *E-PLANNING*, *E-BUDGETING*,
DAN *E-PROCUREMENT* TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH LAMPUNG UTARA

Disusun oleh:

Nama : Oktavia Ayu Padmasari
NIM : 01031182025020
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan
18 Mei 2024

Dosen Pembimbing



Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak
NIP. 1964090319944032001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH IMPLEMENTASI *E-PLANNING*, *E-BUDGETING*, DAN
E-PROCUREMENT TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Disusun Oleh:

Nama : Oktavia Ayu Padmasari
NIM : 01031182025020
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Skripsi : Akuntansi Sektor Publik

Telah diuji dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 27 Juni 2024 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

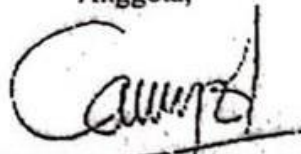
Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 1 Juli 2024

Ketua,



H. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak
NIP. 196409031994032001

Anggota,



Abdul Rohman, S.E., M.Si
NIP. 197207192015101101

Mengetahui,

Plt. Ketua Jurusan Akuntansi

ASLI

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

12/2024
12/07


Prof. Drs. Isnurhadi, M.B.A., Ph. D.
NIP. 196211121989111001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Oktavia Ayu Padmasari
NIM : 01031182025020
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Akuntansi Sektor Publik

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul:

Pengaruh Implementasi *E-planning*, *E-budgeting*, dan *E-procurement* Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara

Pembimbing:

Ketua : Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak
Anggota : Oktavia Ayu Padmasari
Tanggal Ujian : 27 Juni 2024

Adalah benar hasil karya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil orang lain yang tidak saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar sarjana.

Palembang, 1 Juli 2024

Pembuat Pernyataan,



Oktavia Ayu Padmasari

NIM. 01031182025020

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pembuat rencana”

Q.S. An-Anfal ayat 30

“Dengan usaha dan doa, segala yang tidak mungkin menjadi mungkin.”

“Bloom where you are planted”

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Allah Swt. Atas berkat Rahmat dan nikmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua yang selalu mendoakan dan mendukung setiap langkah penulis.
3. Seluruh keluarga besar Thambuh dan keluarga besar A. Somad Moenir yang selalu memberikan bantuan kepada penulis.
4. Teman seperjuangan yang selalu disamping penulis.
5. Terakhir, diri saya sendiri.

“Terimakasih kepada semesta yang telah mengarahkan langkahku menuju cahaya pengetahuan”.

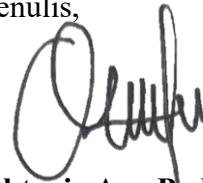
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Implementasi *E-planning*, *E-budgeting*, dan *E-procurement* Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S-1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti dengan senang hati menerima masukan dan saran yang dapat membangun skripsi ini agar lebih baik sehingga dapat bermanfaat bagi berbagai pihak serta bagi penelitian selanjutnya.

Palembang, 1 Juli 2024

Penulis,



Oktavia Ayu Padmasari

NIM. 01031182025020

UCAPAN TERIMAKASIH

Selama proses penyusunan dan penelitian skripsi ini, penulis banyak menghadapi hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala tersebut dapat dilalui berkat bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Allah Swt. yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala nikmat dan karunia pada hambanya terutama kepada penulis.
2. Kepada wanita hebat yang sangat penulis cintai dan sayangi ialah ibu, sosok yang melahirkan, membesarkan, mendidik, serta memberikan yang terbaik pada penulis. Semua pengorbanan tidak akan cukup dengan ucapan terima kasih untuk membalas semuanya. Semoga penulis bisa membalas dengan segala usaha yang penulis lakukan untuk membuat ibu bangga. Selalu sehat dan tolong hidup lebih lama agar selalu ada disetiap langkah anak bungsunya ini. Terimakasih banyak ibu Eva Sri Suszani
3. Kepada pria hebat dalam hidup penulis yang selalu berjuang mengusahakan dan membiayai apapun untuk anaknya. Terimakasih banyak atas semuanya yang ayah kasih buat anak perempuan satu-satunya. Selalu sehat dan tolong hidup lebih lama agar selalu mengayomi istri, anak, dan cucunya. *Love you* ayah, Rozi Th.
4. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E. M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Prof. Dr. Mohammad Adam, S.E., M.E selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Prof. Dr. Inten Meutia, S.E., M.Acc., Ak selaku dosen pembimbing akademik yang sudah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam proses akademik.
8. Ibu Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak membantu untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, kritik, dukungan, doa, ilmu yang baru serta meluangkan waktunya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Bapak Abdul Rohman, S.E., M.Si selaku dosen penguji seminar proposal skripsi dan Ujian Komprehensif yang telah memberikan arahan, masukan, dan kritik untuk menyempurnakan skripsi ini.
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu, pengetahuan serta wawasan bagi penulis selama mengikuti masa perkuliahan.
11. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara yang sudah bersedia menerima pengajuan penulis untuk melakukan penelitian skripsi di kantor dan memfasilitasi penulis sehingga bisa menuntaskan skripsi ini.
12. Kakakku M. Rizky Aji Pratama, Ahmad Maizar, dan M. Daeng Ramadhan yang sudah membimbing dan mengayomi adik bungsunya hingga sekarang. Terimakasih juga kepada ayuk iparku, Lisa Yunita, Astri Yanti, dan Ana

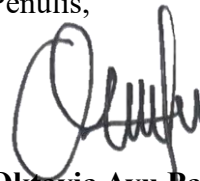
Yunika. Terimakasih selalu memberi arahan dan motivasi kepada penulis. Semoga kalian menjadi ayah dan ibu yang semakin baik dalam membimbing dan membesarkan anak-anak kalian.

13. Keluarga besar H. Somad Moenir yang selalu mendukung dan membantu penulis, persepupuan yang selalu ada dalam susah maupun senang. Terimakasih kepada seluruh sepupu, Amelia Putri, Aulia Situmorang, serta sepupu lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih terkhusus kepada Ananda Aprilivia yang menjadi 24/7 penulis, selalu ada dalam susah maupun senang penulis selama di Kos Biru. Semoga kita bisa mengangkat derajat orang tua dan keluarga besar.
14. Sahabat sejak SMP Erna Rika Herlina, Nafa Nabilah, Sekar Nabilla terimakasih sudah menjadi bagian cerita dalam hidup penulis. Sahabat sejak SMA Diah Nutqi Alif Frasha yang selalu mendengar keluh kesahku. Semoga kita menjadi mba-mba sukses yang kita impikan itu.
15. Sahabat baikku Meidiana Azzahrah yang selalu menjadi sosok 911 penulis, banyak Pelajaran baik yang penulis dapatkan selama berteman dengannya. Terimakasih atas semua kebaikanmu selama ini, semoga dibalas berlipat ganda. Semoga kita dapat mewujudkan semua *wishlist* kita.
16. Sahabat baikku Nasywa Natasha yang selalu memberikan dedikasinya kepada penulis selama berkuliah dari Mahasiswa Baru hingga menjadi Alumni. Terimakasih atas cerita yang dihabiskan berdua. Semoga kita bisa menjadi *independent woman* yang solehah.

17. Kepada Melita Utami, terimakasih atas bantuannya selama perkuliahan dari semester awal hingga lulus. Terimakasih selalu membantu, memberi arahan mengenai tugas, hingga cerita keluh kesah penulis.
18. Kepada Dina Nafri Maharani, Reza Sharafia, Aulia Mutiarani, Janita Putri, terimakasih atas kebaikannya dalam grup wanita solehah. Semoga kelak kita menjadi wanita solehah yang selalu mendapat ridho-nya.
19. Kepada kakak tingkatku, Kak Tasud dan Kak Audy. Terimakasih atas Pelajaran dan bantuannya selama berorganisasi, bersyukur bisa bertemu kating baik seperti kalian.
20. Terakhir, kepada diriku sendiri. Terimakasih sudah berjalan sejauh ini, melalui banyak perjalanan remaja menuju dewasa yang penuh pelajaran. Terimakasih sudah mencoba hal-hal baru, sudah kuat, dan memiliki pemikiran yang baik. Semoga selalu sehat dan umur panjang agar semakin panjang perjalanan kehidupan yang bisa dilalui lagi. Berjanjilah untuk mengangkat derajat ayah ibu serta keluarga besar. Semoga list mimpi dan khayalan banyak yang terceklis. Semoga bisa menebar kebermanfaatan untuk orang sekitar. Jadilah *Independent Woman* yang kamu dambakan itu!

Palembang, 1 Juli 2024

Penulis,



Oktavia Ayu Padmasari

NIM. 01031182025020

ABSTRAK
**PENGARUH IMPLEMENTASI *E-PLANNING*, *E-BUDGETING*, DAN
E-PROCUREMENT TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

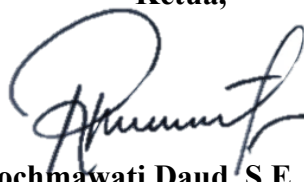
Oleh:

Oktavia Ayu Padmasari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari *e-planning*, *e-budgeting*, dan *e-procurement* terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara. Metode pengambilan data yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan total sampel sebanyak 75 orang. Teknik analisis data menggunakan IBM SPSS 27 dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *e-planning* dan *e-budgeting* berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah, sedangkan *e-procurement* tidak berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Kata kunci: *Transparansi, E-planning, E-budgeting, E-procurement, E-government*

Ketua,



Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak

NIP. 196409031994032001

Mengetahui,

Plt. Ketua Jurusan Akuntansi



Prof. Drs. Isnurhadi, M.B.A., Ph. D.

NIP. 196211121989111001

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF IMPLEMENTATION OF E-PLANNING, E-BUDGETING, AND E-PROCUREMENT ON THE TRANSPARENCY OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT IN THE GOVERNMENT OF NORTH LAMPUNG DISTRICT

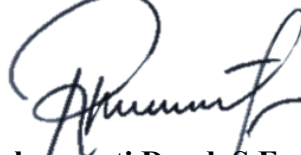
By:

Oktavia Ayu Padmasari

This research aims to determine the impact of e-planning, e-budgeting, and e-procurement on the transparency of regional financial management in the Government of Lampung Utara Regency. The research method employed is quantitative. The population for this study consists of the Regional Apparatus Organization of Lampung Utara Regency. Data was collected using purposive sampling, resulting in a total sample of 75 participants. Data analysis was conducted using IBM SPSS 27 with multiple linear regression analysis. The findings indicate that e-planning and e-budgeting have a positive effect on the transparency of regional financial management, while e-procurement does not affect the transparency of regional financial management.

Keywords: Transparency, E-planning, E-budgeting, E-procurement, E-government

Chairman,



Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak

NIP. 196409031994032001

Asknowledge,

On behalf of Head Accounting Department



Prof. Drs. Isnurhadi, M.B.A., Ph. D.

NIP. 196211121989111001

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Saya dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstraksi skripsi dari mahasiswa:

Nama : Oktavia Ayu Padmasari
NIM : 01031182025020
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang / Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi :

Pengaruh Implementasi *E-planning*, *E-budgeting*, dan *E-procurement* Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara

Telah diperiksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan saya setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Palembang, 1 Juli 2024

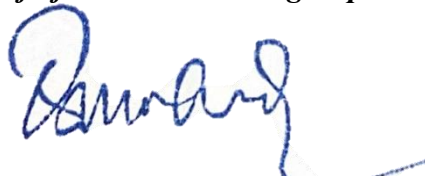
Dosen Pembimbing



Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak

NIP. 196409031994032001

*Asknowledge,
On behalf of Head Accounting Department*



Prof. Drs. Isnurhadi, M.B.A., Ph. D.

NIP. 196211121989111001

RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Mahasiswa : Oktavia Ayu Padmasari
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat / Tanggal lahir : Kotabumi, 30 Oktober 2002
Agama : Islam
Status : Belum menikah
Alamat : Serba Indah, Cempaka Timur, Sungkai Jaya,
Lampung Utara, Lampung
E-mail : oktaviaayupadmasari@gmail.com

Pendidikan Formal

Sekolah Dasar : SDN 01 Cempaka
Sekolah Menengah Pertama : SMPN 06 Kotabumi
Sekolah Menengah Atas : SMAN 2 Kotabumi
Perguruan Tinggi : Universitas Sriwijaya

Organisasi

Badan Penjamin Mutu BEM KM FE UNSRI (2023)
Sekretaris Dinas Hubungan Eksternal BEM KM FE UNSRI (2022)
Kepala Bidang Sumber Daya Manusia IMASFEK UNSRI (2022)
Kepala Bidang Sinematografi IMASFEK UNSRI (2021)
Anggota Divisi Media dan Informasi IMA FE UNSRI (2021)
Anggota bidang Sumber Daya Manusia KEMALA UNSRI(2020)

Pengalaman

Pekerja kontrak sebagai admin sosial media salah satu partai politik (2023)
Pekerja kontrak sebagai operator di TK Nurul An-nisa Cempaka Timur (2021-2023)
Project leader The 1st International Youth Economic Conference BEM FE UNSRI berkolaborasi dengan PMFEP UKM (2023)

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------|
| HALAMAN COVER..... | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI..... | iii |
| SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH | iv |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| UCAPAN TERIMAKASIH | vii |
| ABSTRAK | xi |
| ABSTRACT..... | xii |
| SURAT PERNYATAAN ABSTRAK..... | xiii |
| RIWAYAT HIDUP | xiv |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| DAFTAR TABEL..... | xviii |
| DAFTAR GAMBAR | xix |
| BAB 1 | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 11 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 11 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 12 |
| BAB II..... | 13 |
| TINJAUAN PUSTAKA..... | 13 |
| 2.1 Landasan Teori | 13 |
| 2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>) | 13 |
| 2.1.2 Teori Stewardship (<i>stewardship theory</i>) | 14 |
| 2.2 <i>Electronic Government</i> | 15 |
| 2.3 <i>Electronic Planning</i> | 16 |
| A. Indikator <i>E-planning</i> | 17 |
| B. Manfaat <i>E-planning</i> | 17 |
| C. Tujuan <i>E-planning</i> | 18 |

| | |
|---|----|
| D. Kelebihan dan Kekurangan <i>E-planning</i> | 19 |
| E. Tahapan <i>E-planning</i> | 20 |
| 2.4 <i>Electronic Budgeting</i> | 21 |
| A. Indikator <i>E-budgeting</i> | 21 |
| B. Manfaat <i>E-budgeting</i> | 22 |
| C. Tujuan <i>E-budgeting</i> | 23 |
| D. Kelebihan dan Kekurangan <i>E-budgeting</i> | 24 |
| E. Tahapan <i>E-budgeting</i> | 25 |
| 2.5 <i>Electronic Procurement</i> | 26 |
| A. Indikator <i>E-procurement</i> | 28 |
| B. Manfaat <i>E-procurement</i> | 28 |
| C. Tujuan <i>E-procurement</i> | 29 |
| D. Kelebihan dan Kekurangan <i>E-procurement</i> | 29 |
| 2.6 Transparansi..... | 30 |
| A. Indikator Transparansi | 31 |
| B. Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah..... | 31 |
| 2.7 Penelitian Terdahulu | 32 |
| 2.8 Kerangka Berpikir..... | 35 |
| BAB III | 38 |
| METODOLOGI PENELITIAN..... | 38 |
| 3.1 Ruang Lingkup | 38 |
| 3.2 Jenis Penelitian | 38 |
| 3.3 Jenis dan Sumber Data | 39 |
| 3.4 Populasi dan Sampel | 40 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data | 41 |
| 3.6 Definisi Operasional, Variabel Penelitian dan Indikator | 42 |
| 3.7 Teknik Analisis Data..... | 45 |
| 1) Uji validitas | 45 |
| 2) Uji reliabilitas | 45 |
| 3) Uji Asumsi Klasik | 46 |
| 4) Analisis Regresi liner berganda..... | 49 |
| 5) Uji F (Simultan)..... | 49 |

| | |
|---|----|
| 6) Uji t (Parsial) | 50 |
| 7) Uji Determinasi | 51 |
| BAB IV | 52 |
| PEMBAHASAN | 52 |
| 4.1 Hasil Penelitian..... | 52 |
| 4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian..... | 52 |
| 4.1.2 Uji Validitas | 52 |
| 4.1.3 Uji Realibilitas | 55 |
| 4.1.4 Uji Asumsi Klasik..... | 56 |
| 4.1.5 Analisis Regresi Linear Berganda..... | 59 |
| 4.1.6 UJI F | 60 |
| 4.1.7 UJI T | 61 |
| 4.2 Pembahasan | 62 |
| BAB V..... | 66 |
| KESIMPULAN DAN SARAN..... | 66 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 66 |
| 5.2 Keterbatasan | 67 |
| 5.3 Implikasi | 67 |
| 5.4 Saran..... | 68 |
| DAFTAR PUSTAKA | 70 |
| LAMPIRAN..... | 73 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu | 32 |
| Tabel 3. 1Definisi Operasional, Variabel penelitian dan Indikator | 42 |
| Tabel 4.1 Uji Validitas Y | 53 |
| Tabel 4.2 Uji Validitas X1 | 53 |
| Tabel 4.3 Uji Validitas X2 | 54 |
| Tabel 4.4 Uji Validitas X3 | 54 |
| Tabel 4.5 Uji Realibitas | 55 |
| Tabel 4.6 Uji Multikolinearitas | 58 |
| Tabel 4.7 Analisis Regresi Linear Berganda | 59 |
| Tabel 4.8 Uji F..... | 60 |
| Tabel 4.9 Uji T | 61 |
| Tabel 4.10 Uji Koefisien Determinasi..... | 62 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Berfikir..... | 35 |
| Gambar 4. 1 Uji Normalitas | 56 |
| Gambar 4. 2 Uji Heteroskedastisitas | 57 |

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut pemerintah untuk melakukan inovasi yang sesuai dengan perkembangan zaman disertai kebermanfaatannya bagi masyarakat luas terlebih bagi pemerintah itu sendiri berupa efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Dalam buku Indrajit (2002:3) pemerintah Amerika Serikat menyebutkan bahwa pemerintahan elektronik berkaitan dengan penyediaan informasi dan layanan pemerintah melalui media digital atau secara *online*. Dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah harus mampu mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta memperbaiki kualitas layanan publik (Desrita Reni, 2021).

Berdasarkan Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 pasal 1 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), SIPD merupakan sistem yang dirancang untuk mengelola data dan informasi, serta menyusun, memantau, dan menilai dokumen elektronik rencana pembangunan daerah. Sistem ini digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang bersih dan transparan, serta untuk mewujudkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Nuravita, 2017).

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *E-government* merupakan konsep penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah. *E-government* ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, mendorong sisi pemanfaatan dan keterbukaan informasi, serta mendorong partisipasi publik didalam sistem penyelenggaraan pemerintah (Elysia, dkk. 2017). Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diwajibkan untuk mengembangkan e-government sebagai respons terhadap transformasi hubungan, yaitu perubahan cara berinteraksi antara pemerintah dengan setiap elemen atau *stakeholder*-nya.

Berdasarkan Intruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang pengembangan *e-government* yang mampu memberikan layanan integrasi antar lembaga dengan masyarakat dilakukan melalui empat tingkatan, yaitu tahap persiapan, tahap pematangan, tahap pematapan, dan tahap pemanfaatan. Menurut Arief (2008), pengembangan *e-government* di Indonesia didorong oleh berbagai tuntutan terhadap pelayanan publik yang dapat diandalkan.

E-government memiliki beberapa komponen penting diantaranya *e-planning*, *e-budgeting*, dan *e-procurement*. Penerapan ketiganya ditujukan untuk meningkatkan transparansi informasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Indonesia memiliki SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) yang merupakan Keselarasan dalam metode perencanaan pembangunan bertujuan untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan jangka

panjang yang akan diimplementasikan oleh perangkat daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, perencanaan adalah suatu proses penetapan tindakan masa depan yang mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan dilakukan melalui serangkaian pilihan.

Perencanaan pembangunan disusun secara sistematis dan ringkas. Pemerintah membuat aplikasi yang didasarkan pada strategi *e-government*, yaitu *e-planning*, karena banyak dokumen perencanaan yang harus disusun secara sistematis. Sistem perencanaan Pembangunan daerah yang dikenal dengan sebutan *Electronic Planning (E-planning)* merupakan bagian integral dari *e-government*. *E-planning* ini berupa aplikasi perangkat lunak yang mendukung perencanaan berbasis elektronik. *E-planning* bertujuan untuk memudahkan proses perencanaan pemerintah, meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Penyusunan visi-misi, tujuan, dan sasaran serta program pembangunan adalah contoh tahapan *e-planning*.

Selain *e-planning*, terdapat bagian integral dari *e-government* yaitu *e-budgeting*. Dalam upaya meningkatkan mutu informasi pelaporan keuangan pemerintah, meningkatkan evaluasi kinerja, serta memfasilitasi pengelolaan keuangan lebih akuntabel dan transparan maka diadakannya penganggaran berbasis digital yang biasa dikenal dengan *e-budgeting*. *E-budgeting* merupakan suatu sistem digital penyusunan anggaran berbasis *software* untuk menyediakan serta mempermudah proses penganggaran dan perencanaan (Andriyanto, 2014).

E-budgeting memiliki kemampuan untuk meringkas prosedur yang sudah ada, seperti menyiapkan data standar kemudian menghitung harga satuan, membagi bagian anggaran, dan merancang usulan kegiatan dengan detail anggaran untuk setiap unit satuan kerja (Gamayuni, 2019). *E-budgeting* dalam sektor pemerintahan digunakan untuk menerapkan penyusunan anggaran dan mengawasi pekerjaan karena diharapkan mampu mendorong kemajuan dalam tata kelola keuangan yang sehat (Arini, 2022).

Dalam menekan segala bentuk penyimpangan dan peningkatan efisiensi serta transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa maka diperlukan pelaksanaan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik yang biasa dikenal dengan *e-procurement*. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang kemudian di revisi melalui Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, menetapkan bahwa pengadaan secara elektronik atau *e-procurement* merupakan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Sutedi (2012) *E-procurement* adalah sistem lelang yang melibatkan pengadaan barang oleh pemerintah dengan menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi berbasis internet. *E-procurement* bertanggung jawab dalam mengubah perspektif para pelaku usaha sehingga mereka dapat terus meningkatkan keterampilannya. *E-procurement* memperluas pasar dan mendorong persaingan yang sehat, seperti harga yang lebih kompetitif, transparansi, serta pola interaksi yang lebih baik (Yudho Giri, 2009). *E-*

procurement diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang. Sistem ini memungkinkan barang dan jasa tersedia dengan harga dan kualitas optimal, mempercepat dan mempermudah proses administrasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik (Wijaya, 2010).

Tata laksana pemerintahan yang baik merupakan suatu sistem tata kelola yang memiliki prinsip keterbukaan, keadilan serta dapat dipertanggung jawabkan. Seluruh badan termasuk pemerintah daerah diwajibkan menerbitkan informasi publik atas setiap aktivitas yang dilaksanakan dan melayani permohonan informasi publik secara tepat, hal ini diatur dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Undang-undang tersebut mempertegas tentang transparansi keuangan daerah. Dalam menjaga penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mencegah tindak pidana korupsi, pemerintah menekankan transparansi pengelolaan keuangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi tentang keuangan daerah secara luas.

Sekretariat Nasional Forum Indonesia mengungkapkan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah masih sangat rendah. Tingkat transparansi yang rendah dibuktikan dengan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat daerah. Menurut *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menyatakan Kementerian Dalam Negeri mencatat 483 kasus korupsi yang termasuk kepala daerah dalam

rentang waktu 2019-2020. Sebelumnya, dalam periode 2015-2019, terdapat 203 kasus korupsi dengan tersangka kepala daerah (Fajri, 2019).

Provinsi Lampung dikenal sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera karena letaknya menjadi penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Lampung memiliki potensi untuk lebih berkembang dari pada provinsi atau kota lain, tetapi terhalang dengan berbagai masalah, termasuk korupsi. Meskipun demikian, ekonomi Lampung telah menunjukkan pertumbuhan positif dalam beberapa tahun terakhir (Endaryanto, 2018).

Menurut Bank Indonesia, ekonomi Lampung tumbuh sebesar 5,22% pada kuartal II 2022, lebih tinggi dari rata-rata tingkat pertumbuhan di Sumatera. Pada triwulan I 2023, ekonomi Lampung tumbuh 4,96% *year-on-year*, meskipun terjadi perlambatan di beberapa sektor akibat pandemi COVID-19. Pemerintah provinsi telah bekerja untuk meningkatkan infrastruktur Lampung, termasuk memperbaiki jalan yang rusak dan melanjutkan proyek Kota Baru. Namun, tingkat inflasi Lampung sebesar 2,19% pada tahun 2021, dan tingkat kemiskinan sebesar 11,44%, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 9,57%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung meningkat sebesar 69,9 poin pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020, menunjukkan peningkatan dalam pembangunan provinsi secara keseluruhan. Terlepas dari tantangannya, Lampung memiliki potensi untuk pengembangan lebih lanjut diberbagai sektor. Memasuki triwulan II tahun 2022, realisasi penerimaan anggaran pendapatan APBD Provinsi Lampung tercatat sebesar Rp2,88 triliun, mencapai 43,99% dari target tahunan sebesar Rp6,56 triliun. Sementara itu, pada sisi belanja daerah,

realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp2,20 triliun atau 31,45% dari target tahunan sebesar Rp7,01 triliun. Pencapaian ini, baik dari sisi pendapatan maupun belanja, lebih tinggi secara nominal maupun persentase dibandingkan triwulan II tahun 2021. Namun, tingkat transparansi di kabupaten/kota Provinsi Lampung masih cukup rendah. Menurut *Open Budget Index (OBI)*, tingkat keterbukaan informasi publik pemerintah daerah di Provinsi Lampung berada dalam kategori tidak cukup transparan, dengan indeks di bawah 20%, yang menunjukkan kurangnya keterbukaan dalam informasi pengelolaan keuangan daerah di *website*.

Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2021, Direktorat Monitoring, Kedeputian Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa pemerintah daerah (pemda) di Provinsi Lampung rentan korupsi. Hasil dari survey tersebut menyatakan bahwa Lampung memiliki rata-rata 69,3% dibawah rata-rata nasional 72%. Selain Provinsi Lampung, KPK menyoroti enam daerah di Lampung yang masuk dalam kategori sangat rentan korupsi, diantaranya Bandar Lampung 65,6%, Lampung Utara 62,7%, Pesawaran 67%, Tanggamus 65%, Lampung Selatan 58,7%, dan Lampung Timur 52%.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah unit organisasi atau lembaga pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi tertentu sesuai dengan peraturan daerah dan struktur pemerintahan. Besaran organisasi perangkat daerah (OPD) didasarkan pada sejumlah faktor, termasuk jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah APBD. OPD memainkan peran penting dalam pengelolaan

keuangan daerah diantaranya menyusun anggaran pemerintah daerah, mengembangkan tata kelola pemerintah daerah, melaksanakan program pengelolaan keuangan daerah, melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pemerintah daerah, serta menyediakan dokumentasi dan pelayanan informasi perangkat daerah (Mulyani, 2022).

Menurut penelitian Zalfa Muthiah (2021), *e-planning* berpengaruh positif terhadap transparansi keuangan daerah di Pemerintah Kota Palembang, terutama pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah. Temuan ini konsisten dengan penelitian Nuravita (2017) yang juga menyatakan bahwa *e-planning* memiliki pengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Namun, hasil temuan ini bertolak belakang dengan penelitian Maharani (2020) yang menyimpulkan bahwa penerapan *e-planning* tidak mempengaruhi transparansi pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Demak.

Menurut Nasution dan Ramadhan (2019), terdapat 32 pemerintah daerah di Indonesia yang menunjukkan bahwa penerapan *e-budgeting* memiliki pengaruh positif terhadap transparansi keuangan daerah. Namun, hal ini berbeda dengan hasil penelitian Nasution dan Atika (2019) yang menunjukkan bahwa implementasi *e-budgeting* tidak berpengaruh dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan *e-budgeting* di pemerintah Kota Binjai baru berjalan satu tahun sehingga pengaruhnya belum dapat dinilai secara maksimal. Selanjutnya, penelitian itu

memperjelas bahwa hubungan antara *e-budgeting* dan peningkatan akuntabilitas serta transparansi bernilai rendah.

Menurut penelitian oleh Frankoe (2019), *e-procurement* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran di Provinsi Lampung dan Provinsi Bangka Belitung. Implementasi *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah, oleh sebab itu pemerintah terkhusus LKPP hendaknya meningkatkan implementasi sistem pengadaan secara elektronik (Nugroho, 2019). Sedangkan Menurut Faisol (2014) bahwa tahapan *e-procurement* tidak sepenuhnya mampu mencegah terjadinya kecurangan pengadaan. Penelitian yang telah dilaksanakan Apriliani (2022) menyatakan bahwa penerapan *e-planning* dan *e-budgeting* tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Namun, *e-procurement* memiliki dampak positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di Jawa Tengah. SAKIP tidak akan terpengaruh oleh kekurangan dalam praktik *e-planning*, *e-budgeting*, dan *e-procurement* di Jawa Tengah.

Meskipun banyak penelitian telah mengkaji manfaat teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik, penelitian mengenai pengaruh spesifik Implementasi *E-planning*, *E-budgeting*, dan *E-procurement* terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah masih relatif terbatas. Terutama dalam konteks pemerintah daerah seperti Kabupaten Lampung Utara, dimana kondisi geografis, sumber daya manusia, dan infrastruktur teknologi informasi dapat berbeda signifikan dibandingkan dengan daerah lain. Penelitian sebelumnya cenderung lebih fokus pada satu aspek

teknologi informasi atau hanya menyentuh permukaan dari integrasi sistem yang lebih luas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan mengeksplorasi bagaimana kombinasi dari ketiga elemen *E-governance* ini dapat mempengaruhi transparansi pengelolaan keuangan daerah secara holistik, dan sejauh mana faktor-faktor lokal berperan dalam implementasinya.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, peneliti ingin memodifikasi penelitian yang telah dilakukan oleh Apriliani (2023) mengenai Pengaruh *E-planning*, *E-budgeting*, dan *E-procurement* terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. Peneliti ingin mengembangkan penelitian dengan menguji variabel Y yang dimodifikasi yaitu Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karena itu, peneliti akan menguji Implementasi *E-planning*, *E-budgeting*, dan *E-procurement* terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan temuan *Open Budget Index* (OBI) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan KPK serta latar belakang yang ada, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Implementasi *E-planning*, *E-budgeting*, dan *E-procurement* Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah pengaruh implementasi *e-planning* terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Lampung Utara?
- 2) Apakah pengaruh implementasi *e-budgeting* terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Lampung Utara?
- 3) Apakah pengaruh implementasi *e-procurement* terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Lampung Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh implementasi *e-planning* terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
- 2) Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh implementasi *e-budgeting* terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
- 3) Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh implementasi *e-procurement* terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pengaruh implementasi *e-planning*, *e-budgeting*, dan *e-procurement* terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian dimasa mendatang, terutama dalam bidang akuntansi sektor publik, serta memberikan informasi secara yang relevan bagi peneliti yang terkait dengan isu ini.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai prasyarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dan menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya. Hasil dari penelitian ini juga dapat menambahkan wawasan serta pengetahuan yang terkait dengan bidang akuntansi sektor publik, terutama berkaitan dengan topik penelitian ini.

b. Bagi Pembaca dan Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak lembaga atau instansi pemerintah dalam menggunakan sistem *e-planning*, *e-budgeting*, dan *e-procurement*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. (2014). *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya* (kedua). Sinar Grafika.
- Andika, R. (2022). *Analisis Pemanfaatan E-planning Rencana Kerja Tahunan Dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Di Kantor Bappeda Kabupaten Bone*.
- Andriyanto, N. (2014). *Good Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-government*. Malang: Banyu Media Publishing.
- Apriliani, A. S., Dirgantari, N., Hariyanto, E., & Wibowo, H. (2022). Pengaruh *E-planning*, *E-budgeting*, dan *E-procurement* Terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. *Owner*, 7(1), 254–264. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1289>
- Arini, S. & N. S. (2022). Analisis Implementasi *E-budgeting* dalam Mendukung Transparansi pada Pemerintah Kota Surakarta. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(2), 92–185.
- Desrita Reni. (2021). *Implementasi Sistem E-planning Pada Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti*.
- Donaldson, L. , & D. J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Stakeholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16, 49–64.
- Dwi Maharani, D., & Manar Ghulan, D. (2021). *Penerapan E-planning sebagai bentuk Sistem Perencanaan Daerah Berbasis Teknologi di Kabupaten Demak*.
- Endaryanto, T., Firdaus, M., Siregar, H., Budiman, D., Mahasiswa, H., Sekolah, D., Program, P., Perencanaan, S. I., Wilayah, P., & Perdesaan, D. (2018). Analisis Kinerja Ekonomi dan Keuangan Daerah di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 20(1), 95–102.
- Faisol, I. A. , T. M. S., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2014). Pengaruh Penerapan *E-procurement* Terhadap Pencegahan Fraud di Sektor Publik. In *Oktober* (Vol. 02, Issue 2).
- Fajri, R. N. , D. & H. S. (2019). Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan, Sistem Pengawasan Melekat dan Prinsip Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Rembang). *Jurnal Balance*, XVI(1), 64–83.

- Gamayuni, R. R. (2019). *E-planning and E-budgeting Implementation: A Qualitative Study in Lampung Province*.
- Ghozali I. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*.
- Hafiz A.T. (2010). *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik*.
- Juliandi A, I. M. S. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis: Konsep dan Aplikasi*.
- Kholmi M. (2014). Persepsi Pengurus Partai terhadap Akuntabilitas Keuangan Partai Politik. *Jurnal Review Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 364–365.
- Klitgard, R. (2015). International Cooperation Agains Corruption. *Finance and Develpoment*, 35(1), 4–6.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. In Andi (Ed.), *Yogyakarta: Andi*.
- Nasution, D. A. D. & R. P. R. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah . *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(2), 30–43.
- Nasution, D., & Puja R.Ramadhan. (2019). Pengaruh Implementasi *E-budgeting* Terhadap Transparansi Keuangan Daerah Di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 669. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p26>
- Nugroho, R. S. , W. A. H. , T. (2019). Pengaruh Implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (*E-procurement*) Terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan). In *JAP* (Vol. 3, Issue 1).
- Nuravita, W. (2017). *Penerapan E-planning Dalam Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan Pembangunan Daerah (Studi Pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar)*.
- Nurhadianto, T., & Khamisah, N. (2019). *Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung*. 3(5), 25–30.
- Nurrizkiana, B., Handayani, L., & Widiastuty, E. (2017). Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 18(1). <https://doi.org/10.18196/jai.18159>
- Permatasari, O. & B. S. (2021). Implementasi *E-budgeting* in the Era of the COVID-19 Pandemic at the Regional Secretariat of Sidoarjo Regency. *Business and Economics*, 4.

- Qurbani, M. (2022). *Efektivitas Penggunaan Sistem E-planning dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan di Pemerintah Kabupaten Meranti*.
- Rahman, R. A. T. , I. G. , & R. (2018). Evaluation Of *E-budgeting* Implementation in Provincial Government of DKI Jakarta Using CIPP Model Approach. *Journal Of Accounting and Investment*, 20(1).
- Ramadhani, P. (2023). *Implementasi Aplikasi E-planning dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai (Studi Kasus Bappeda Sumut)*.
- Sugiyono. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Wijaya & Wibawa. (2010). Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi 13*.
- Yudho Giri. (2009). Inovasi Layanan Publik melalui E- Procurement, diambil dari Makalah Pembekalan Layanan Pengadaan Barang Secara Elektronik. *Bappenas*.
- Zarnelly. (2017). *Sistem Informasi E-budgeting Menggunakan Pendekatan Berorientasi Objek (Studi Kasus: UIN SUSKA Riau)*. 3(1).